



KOLABORASI ANTAR STAKEHOLDER DALAM PELAKSANAAN FESTIVAL TABOT (Studi Kasus Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu)

Anisa Difenta¹⁾; Bambang Sutikno²⁾; Desita Rahayu³⁾

Program of Public Administration

Department of Administration Publik, STIA Bengkulu

Email: ¹⁾anisadifenta@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [16 Mei 2026]

Revised [20 Juni 2026]

Accepted [31 Juli 2026]

KEYWORDS

Kolaborasi, Stakeholder,
Festival, Tabot

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Setiap tahunnya, Festival Tabot yang diselenggarakan oleh berbagai pihak merupakan warisan budaya Bengkulu. Berdasarkan teori kepemimpinan kolaboratif Ansell dan Gash (2007), yang meliputi proses kolaboratif, kepemimpinan fasilitatif, kondisi awal, dan desain kelembagaan, tujuan penelitian ini adalah untuk menyediakan berbagai bentuk kolaborasi antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Festival Tabot. Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Pemangku kepentingan dalam penelitian ini termasuk tokoh adat, masyarakat lokal, Dinas Pariwisata, dan Yayasan Tabot Bengkulu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan terjalin secara dinamis dan partisipatif, ditandai dengan komunikasi yang terbuka, pembagian peran yang jelas, dan komitmen untuk melestarikan budaya Tabot. Namun, ada tantangan seperti keterbatasan dalam koordinasi dan anggaran. Secara keseluruhan, kerja sama ini menunjukkan praktik kerja sama pemerintahan, yang sangat penting bagi keinginan Festival Tabot di Bengkulu.

ABSTRACT

The Tabot Festival, organized annually by various parties, is a cultural heritage of Bengkulu. Based on Ansell and Gash's (2007) theory of collaborative leadership, which includes collaborative processes, facilitative leadership, initial conditions, and institutional design, the purpose of this study is to provide various forms of collaboration between parties involved in the implementation of the Tabot Festival. To collect data, this study used a descriptive qualitative methodology. Stakeholders in this study included traditional leaders, local communities, the Tourism Office, and the Bengkulu Tabot Foundation through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that collaboration between stakeholders is dynamic and participatory, characterized by open communication, clear role divisions, and a commitment to preserving the Tabot culture. However, there are challenges such as limitations in coordination and budget. Overall, this collaboration demonstrates the practice of government cooperation, which is very important for the success of the Tabot Festival in Bengkulu.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dalam manajemen pariwisata, kolaborasi antar stakeholder sangat penting untuk keberhasilan sebuah festival. Festival, terutama yang berbasis budaya, melibatkan banyak orang dengan berbagai tujuan. Ini termasuk pemerintah yang membuat kebijakan, bisnis yang menyediakan layanan dan mendukung keuangan, komunitas lokal yang memiliki tradisi, dan media dan akademisi yang menulis dan mengembangkan pengetahuan. Menurut teori pemangku kepentingan, keberhasilan inisiatif pariwisata

sangat bergantung pada seberapa baik para pemangku kepentingan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama (Freeman 1984).

Ketika semua pihak bekerja sama dengan baik, rasa kepemilikan festival meningkat. Jika setiap orang merasa mereka bertanggung jawab atas keberhasilan acara, mereka cenderung lebih berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas acara di masa depan. Keberhasilan jangka pendek seperti peningkatan jumlah pengunjung adalah hasil jangka panjang dari kolaborasi ini; itu juga memperkuat identitas budaya, meningkatkan citra destinasi, dan pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi sangat penting untuk keberhasilan dan keberlanjutan festival, bukan hanya strategi teknis (Freeman 1984).

Program Kharisma Event Nusantara (KEN) didirikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk meningkatkan posisi festival budaya. KEN bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan festival, melibatkan pelaku ekonomi kreatif, dan mempromosikan destinasi wisata berbasis budaya (Kemenparekraf, 2023).

Salah satu ikon pariwisata Provinsi Bengkulu adalah Festival Tabot, yang diadakan setiap tahun pada bulan Muharram. Tidak hanya memiliki nilai religius dan historis, festival ini juga merupakan daya tarik wisata yang dapat meningkatkan ekonomi lokal melalui kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi kreatif (Hafiz and Suryaningsih 2022). Namun, partisipasi aktif masyarakat masih sulit dicapai, baik dalam hal keterlibatan langsung dalam kegiatan maupun dukungan dalam promosi dan pelestarian nilai-nilai budaya (Pratiwi and Gunawan 2021).

Selain itu, festival budaya yang sukses biasanya melibatkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan, yang menghasilkan rasa kepemilikan yang kuat. Ini telah ditunjukkan untuk meningkatkan komitmen jangka panjang untuk mendukung keberlanjutan acara, mengurangi konflik kepentingan, dan memperkuat hubungan ekonomi dan sosial lokal (P. Sari dan Dewi 2022). Kolaborasi dengan media dan pelaku industri kreatif sangat penting dalam promosi dan pengembangan pasar karena dapat meningkatkan jangkauan audiens dan meningkatkan citra destinasi (L. Putri dan Santoso 2020).

Oleh karena itu, kolaborasi antar stakeholder bukan sekadar pelengkap tetapi juga komponen strategis yang menentukan keberhasilan festival budaya dan keberlanjutannya. Keterlibatan aktif semua pihak dari perencanaan hingga evaluasi membedakan festival yang hanya berlangsung dari yang memiliki efek positif jangka panjang (Pramono, Wulandari, and Syahputra 2023).

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Bengkulu adalah lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab atas urusan kebudayaan dan pariwisata. Lembaga ini memainkan peran penting dalam pengelolaan, pelestarian, dan promosi budaya lokal, termasuk penyelenggaraan Festival Tabot. Lembaga ini juga mendorong partisipasi masyarakat, menjaga nilai-nilai budaya, dan mendorong komunitas lokal untuk berkembang. Peran ini semakin penting mengingat dinamika sosial-budaya saat ini yang menunjukkan bahwa makna budaya berubah karena modernisasi dan globalisasi.

Dalam hal Festival Tabot, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu memiliki wewenang untuk membuat agenda kegiatan, membuat anggaran, dan membangun struktur kepanitiaan. Mereka juga dapat bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk komunitas adat, organisasi pemuda, bisnis kecil dan media lokal. Ini menunjukkan bahwa Disbudpar tidak hanya bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis tetapi juga berperan secara strategis dalam menentukan masa depan festival budaya (Bengkulu 2023).

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu juga berperan dalam menjembatani kepentingan antara pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan masyarakat lokal. Melalui program-program seperti pelatihan kebudayaan, penyuluhan pariwisata berbasis komunitas, serta digitalisasi promosi, Disbudpar berupaya memperluas pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya Tabot dan meningkatkan keterlibatan aktif dalam penyelenggaraan festival.

Meskipun demikian, Disbudpar seringkali terjebak dalam sistem kerja yang birokratis dan tidak beradaptasi dengan perubahan masyarakat. Agenda formal pemerintah masih mendominasi beberapa kegiatan festival, tanpa memberi komunitas adat atau pemuda lokal kesempatan yang cukup untuk berpartisipasi. Ini menyebabkan perbedaan antara masyarakat dan pemerintah dalam hal mengelola budaya (Pratiwi and Gunawan 2023).

Untuk memastikan bahwa festival ini tetap relevan, inklusif, dan berkelanjutan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu (Disbudpar) memiliki tugas yang besar. Pendidikan budaya, pemberdayaan komunitas adat, regenerasi pelaku budaya, dan pemanfaatan teknologi informasi harus menjadi komponen dari rencana ini untuk mendorong promosi.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu telah menjalankan beberapa program seperti pelibatan komunitas Tabot, promosi digital, kolaborasi dengan sekolah, hingga pendampingan UMKM lokal. Namun, sejauh mana strategi ini efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat belum banyak dikaji secara akademik. Dalam laporan evaluasi tahunan, disebutkan bahwa dominasi pemerintah

dalam pengelolaan festival masih tinggi, sementara peran masyarakat umum belum maksimal (Disbudpar Bengkulu 2023).

Mengingat pentingnya pelibatan berbagai stakeholder dalam optimalisasi manfaat festival tabot dikota Bengkulu maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kolaborasi antar stakeholder pelaksanaan festival tabot, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan acara tersebut.

LANDASAN TEORI

Teori Governance (Tata Kelola Pemerintahan)

Menurut teori governance, proses pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengelolaan sumber daya dalam suatu sistem tidak hanya dilakukan oleh satu orang; itu adalah hasil dari interaksi terus-menerus antar aktor yang memiliki kepentingan yang berbeda, baik dalam sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil. Pendekatan ini berpendapat bahwa keberhasilan suatu program atau kegiatan sangat bergantung pada seberapa baik berbagai pihak berkomunikasi, memahami peran masing-masing, dan mencapai konsensus untuk kepentingan umum. Hubungan yang ada di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pemerintahan bersifat horizontal, yang mengarah pada kerja sama yang setara dan mengurangi dominasi satu pihak tertentu (B Bramwell and Lane 2011).

Dalam industri pariwisata, manajemen berfokus pada pembentukan jaringan kolaboratif, atau jaringan kolaboratif, yang mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, menjamin transparansi, memperkuat akuntabilitas, dan memfasilitasi koordinasi lintas sektor untuk mencapai tujuan bersama dalam pengembangan destinasi dan penyelenggaraan acara. Model ini menunjukkan pergeseran paradigma dari pemerintah, yang biasanya menempatkan pemerintah sebagai aktor dominan, menuju governance, di mana stakeholder memiliki peran dan tanggung jawab yang lebih proporsional. Metode ini meningkatkan kualitas tata kelola dan meningkatkan keberlanjutan program pariwisata dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara keseluruhan (B Bramwell and Lane 2011).

Studi menunjukkan bahwa keberlanjutan destinasi dan keberhasilan acara budaya meningkat ketika prinsip governance diterapkan dalam pariwisata. Misalnya, komunikasi yang efektif, pembagian tugas yang jelas, dan sistem koordinasi yang jelas dapat meningkatkan efektivitas program dan meningkatkan kepercayaan antar pihak (Andari, Saputra, and Fauzi 2020).

Teori Kolaborasi

Menurut teori kolaborasi, kerja sama antara berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda dapat menghasilkan sinergi untuk mencapai tujuan bersama yang tidak dapat dicapai secara efektif oleh masing-masing pihak secara individu. Kolaborasi dalam pariwisata berarti bekerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, komunitas lokal, akademisi, dan media untuk menyelesaikan masalah bersama, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, dan berbagi informasi (Gray and Purdy 2021). Metode ini menekankan bahwa kolaborasi adalah lebih dari sekadar koordinasi; itu adalah komitmen yang akan bertahan untuk waktu yang lama yang didasarkan pada rasa saling percaya dan rasa harga diri masing-masing pihak.

Dalam pariwisata, kolaborasi memerlukan tujuan yang disepakati bersama, peran dan tanggung jawab yang jelas, dan mekanisme komunikasi yang terbuka. Studi Mutmainnah and Dharma (2020) menemukan bahwa kepercayaan (trust), kepemimpinan partisipatif, dan manfaat nyata yang dirasakan oleh semua pihak yang terlibat adalah tiga komponen yang sangat penting untuk keberhasilan kolaborasi. Pengembangan kemampuan para aktor melalui pelatihan dan pendampingan juga sangat penting untuk menjamin bahwa proses kerja sama terus berlangsung.

Di industri pariwisata, teori kolaborasi sering digunakan melalui model pemerintahan kolaboratif yang menggabungkan prinsip transparansi, partisipasi aktif, dan akuntabilitas. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rijal and Sutrisno(2021), model ini adalah pendekatan yang efektif untuk manajemen festival budaya dan destinasi wisata berbasis komunitas karena memungkinkan proses pengambilan keputusan bersama yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Metode seperti ini juga memiliki kemampuan untuk mengurangi ketegangan, meningkatkan peluang ekonomi, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Selain itu, inovasi dalam pengelolaan pariwisata dapat dicapai melalui kolaborasi yang direncanakan dengan baik. menemukan bahwa ide-ide kreatif muncul, jejaring pemasaran diperluas, dan daya tarik wisata meningkat ketika banyak pihak terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pariwisata. (Prasetyo, Sari, dan Wibowo (2022) Penelitian ini menunjukkan bahwa teori kolaborasi tidak hanya relevan untuk meningkatkan efisiensi manajemen pariwisata tetapi juga untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi daerah wisata.

Kolaborasi

Kolaborasi adalah jenis kerja sama di mana dua atau lebih orang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan menggunakan sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan masing-masing. Studi oleh R. Putri dan Adnan (2021) menemukan bahwa kolaborasi sangat penting untuk menghasilkan inovasi di banyak bidang, seperti pendidikan, bisnis, dan pemerintahan. Dalam era digital, kerja sama tidak lagi terbatas pada pertemuan fisik; sekarang dapat dilakukan secara virtual melalui berbagai platform online, yang memungkinkan lebih banyak orang bekerja sama secara efektif dan dalam jangkauan waktu yang lebih luas.

Kolaborasi antara pendidik, siswa, dan pemangku kepentingan eksternal di sektor pendidikan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Suryani, dan Lestari (2022) menunjukkan bahwa kolaborasi berbasis teknologi mendorong pembelajaran aktif, memudahkan pertukaran ide, dan meningkatkan partisipasi siswa. Selain itu, kolaborasi ini memperkuat hubungan antar lembaga pendidikan, memperluas akses terhadap sumber daya, dan mempercepat penerimaan pendekatan pendidikan yang baru.

Kolaborasi antar perusahaan dan lintas sektor sangat penting dalam konteks bisnis untuk meningkatkan daya saing. Menurut penelitian Rahayu dan Pratama (2020), kolaborasi strategis dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko, dan membuka peluang baru di pasar. Kolaborasi juga memungkinkan transfer keahlian dan teknologi yang mendukung pengembangan produk atau layanan yang lebih kompetitif.

Di tingkat pemerintahan, kolaborasi juga sangat penting, terutama dalam menangani masalah kompleks seperti pembangunan berkelanjutan, kesehatan masyarakat, dan perubahan iklim. Handayani dan Nugroho (2023) menemukan bahwa keberhasilan kolaborasi lintas lembaga pemerintah sangat bergantung pada komunikasi yang baik, kejelasan peran, dan kepercayaan antar pihak. Oleh karena itu, kolaborasi bukan hanya cara untuk meningkatkan efisiensi tetapi juga cara untuk membangun kerja sama yang bermanfaat dalam jangka panjang yang berdampak luas pada masyarakat.

Teori Stakeholder

Menurut teori stakeholder, keterlibatan dan dukungan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan tersebut sangat memengaruhi keberhasilan suatu organisasi atau program, termasuk dalam sektor pariwisata.

Penelitian terbaru menekankan pentingnya manajemen hubungan antar stakeholder untuk mencapai tujuan bersama yang berkelanjutan, dan gagasan ini pertama kali diperkenalkan oleh Freeman (Font et al. 2021). Dalam industri pariwisata, banyak pihak yang berpartisipasi, termasuk pemerintah, bisnis, komunitas lokal, akademisi, media, dan wisatawan. Setiap pihak memiliki tanggung jawab khusus untuk memastikan destinasi atau event pariwisata berhasil.

Untuk keterlibatan stakeholder yang berhasil, diperlukan komunikasi yang terbuka dan terbuka, serta partisipasi aktif dalam proses dari perencanaan hingga evaluasi. Penelitian yang dilakukan oleh Dangi and Jamal (2020), menyatakan bahwa partisipasi membantu menentukan prioritas bersama, mengurangi konflik kepentingan, dan memastikan bahwa manfaat lingkungan, ekonomi, dan sosial dirasakan secara merata. Metode ini semakin penting dalam konteks keberlanjutan, di mana pengambilan keputusan mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi komunitas dan lingkungan serta keuntungan jangka pendek.

Teori stakeholder menekankan bahwa koordinasi dan sinergi antar pihak sangat penting dalam pengelolaan festival atau event pariwisata untuk keberhasilan. Menurut penelitian Kastenholz, Eusébio, and Carneiro (2022), festival budaya yang berhasil biasanya memiliki mekanisme kerja sama yang jelas, pembagian tugas yang terorganisir, dan evaluasi bersama setelah pelaksanaan. Rasa kepemilikan yang kuat atau rasa kepemilikan membantu acara berlanjut.

Selain itu, inovasi dalam industri pariwisata terkait dengan teori stakeholder. Sebuah penelitian oleh Garcia, Gomez, and Molina (2023) menunjukkan bahwa interaksi antara berbagai stakeholder dapat menghasilkan gagasan inovatif untuk mengembangkan produk wisata, meningkatkan pasar, dan meningkatkan daya saing destinasi. Oleh karena itu, teori stakeholder memiliki peran strategis dalam

mendorong keberlanjutan, inovasi, dan kesejahteraan komunitas di industri pariwisata selain memberikan kerangka konseptual untuk mengelola hubungan antar pihak.

Teori Jaringan Kolaboratif

Menurut teori kolaboratif, keberhasilan suatu program atau kegiatan pariwisata sangat bergantung pada kemampuan para peserta untuk bekerja sama secara terstruktur, berbagi sumber daya, dan membangun tujuan bersama. Menurut (Andrades and Dimanche, n.d.), kerja sama memungkinkan sinergi antara bisnis, pemerintah, komunitas lokal, akademisi, dan media. Ini menghasilkan keberlanjutan dan inovasi di tempat wisata. Konsep utamanya adalah kesetaraan peran, transparansi, dan partisipasi aktif dari semua pihak.

Teori kolaboratif dalam pengelolaan destinasi berfokus pada pembentukan pemerintahan kolaboratif, yaitu mekanisme pengambilan keputusan yang menggabungkan pendapat berbagai stakeholder. Bramwell and Lane (2011) menyatakan bahwa kerja sama dapat mengurangi konflik kepentingan, meningkatkan legitimasi kebijakan, dan memastikan bahwa strategi pengembangan pariwisata sesuai dengan kelestarian lingkungan dan kebutuhan masyarakat lokal.

Selain itu, kolaborasi berhasil membutuhkan modal sosial yang kuat. Kepercayaan (trust) dan komunikasi yang terbuka antar pihak adalah dasar kolaborasi yang bertahan lama, menurut penelitian (Aref and Redzuan 2022). Dalam pengembangan pariwisata, modal sosial yang tinggi akan mempercepat pengambilan keputusan, mengurangi ketidakpastian, dan pertukaran informasi.

Terakhir, teori kolaboratif menekankan betapa pentingnya evaluasi bersama dalam siklus kolaborasi. Menurut (Timur and Getz 2023), proses evaluasi partisipatif memungkinkan semua pihak menilai capaian, menemukan hambatan, dan membuat rencana perbaikan. Oleh karena itu, teori kolaboratif tidak hanya memberikan kerangka konseptual untuk mengatur hubungan antar pihak, tetapi juga memberikan pedoman praktis untuk menghasilkan inovasi dan keberlanjutan di bidang pariwisata.

Model-Model Teori Kolaboratif

Dalam industri pariwisata, banyak model dari teori kolaboratif telah dibuat yang menekankan betapa pentingnya keterlibatan multipihak dalam mengelola destinasi dan mengatur acara. Menurut Model Governance Kolaboratif, pengambilan keputusan terjadi sebagai hasil dari interaksi antara berbagai pihak yang memiliki kedudukan setara. Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator untuk menghubungkan kepentingan LSM, komunitas lokal, sektor swasta, dan akademisi. Metode ini terbukti mengurangi konflik kepentingan dan memperkuat legitimasi kebijakan pariwisata, seperti yang dijelaskan oleh (Bill Bramwell and Lane 2021).

1. Model Manajemen Jaringan (*Network Governance Model*)

Model manajemen jaringan (*network management model*) merupakan pendekatan pengelolaan hubungan antar organisasi atau aktor yang saling terhubung dalam suatu jaringan kerja sama, dengan fokus pada pengaturan interaksi, koordinasi, dan kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama secara efektif (Provan and Kenis 2008). Model ini relevan karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan pemerintah daerah, komunitas lokal, pelaku usaha, media, dan sponsor yang memiliki kepentingan serta sumber daya berbeda. Prinsip utama manajemen jaringan meliputi partisipasi inklusif, transparansi, kepercayaan timbal balik, dan kepemimpinan kolaboratif yang memfasilitasi kerja sama tanpa dominasi pihak tertentu (Ansell and Gash 2008).

Menurut Provan and Kenis (2008), terdapat tiga bentuk utama tata kelola jaringan, yaitu *shared governance* di mana semua anggota mengelola hubungan secara langsung; *lead organization* yang menempatkan satu organisasi sebagai koordinator utama; dan *network administrative organization* (NAO) yang menunjuk badan khusus untuk mengelola jaringan secara penuh. *Shared governance* dapat digunakan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat, *lead organization* efektif jika pemerintah daerah menjadi penggerak utama, sedangkan NAO cocok bila dibentuk panitia atau yayasan khusus yang bertanggung jawab terhadap manajemen festival setiap tahunnya.

2. Model Kerja Sama Terintegrasi (*integrated collaboration model*)

Model kerja sama terintegrasi adalah pendekatan yang menggabungkan berbagai fungsi, sumber daya, dan peran dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan atau proyek ke dalam satu sistem koordinasi yang terpadu. Tujuannya adalah menciptakan sinergi yang meminimalkan

duplikasi pekerjaan, mempercepat pengambilan keputusan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas hasil (Keast et al. 2007). Dalam model ini, setiap stakeholder tidak hanya menjalankan perannya secara mandiri, tetapi juga menyelaraskan strategi, berbagi informasi, dan melakukan perencanaan bersama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Ciri utama kerja sama terintegrasi meliputi adanya sistem komunikasi yang terbuka, mekanisme koordinasi formal, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta kesepakatan mengenai indikator keberhasilan yang diakui semua pihak (Imperial 2005). Model ini banyak digunakan dalam pengelolaan program lintas sektor, proyek pembangunan daerah, maupun penyelenggaraan event besar yang memerlukan partisipasi dari berbagai organisasi dengan kompetensi berbeda.

Model kerja sama terintegrasi dapat diterapkan dengan membentuk tim koordinasi lintas stakeholder yang memiliki agenda kerja, anggaran, dan sistem monitoring bersama. Hal ini memungkinkan seluruh pihak pemerintah, komunitas, pelaku usaha, media, hingga sponsor untuk bergerak secara serempak, sehingga pelaksanaan festival berjalan lebih efisien dan berdampak luas.

Model kerja sama terintegrasi antar stakeholder



3. Model Kolaborasi Adaptif

Model kolaborasi adaptif adalah pendekatan kerja sama yang menekankan fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, dan penyesuaian strategi sesuai dinamika lapangan. Dalam model ini, berbagai *stakeholder* termasuk pemerintah daerah, komunitas budaya, tokoh adat, pelaku usaha, sponsor, media, dan masyarakat bekerja sama secara partisipatif untuk mencapai tujuan bersama. Pemerintah berperan dalam penyediaan regulasi, anggaran, dan fasilitas publik, sementara komunitas budaya memastikan pelestarian nilai tradisi agar tetap otentik (Jamal & Getz, 1995). Pelaku usaha dan sponsor mendukung dari sisi pendanaan dan promosi, sedangkan media membantu memperluas jangkauan informasi kepada publik (McIntosh & Zahra, 2007). Pendekatan adaptif ini mendorong komunikasi terbuka, koordinasi lintas sektor, dan pengambilan keputusan bersama sehingga peran dapat disesuaikan secara cepat ketika menghadapi perubahan, seperti kondisi cuaca ekstrem atau kendala teknis.

Prosesnya mencakup identifikasi stakeholder, perencanaan bersama, pelaksanaan fleksibel, monitoring berkelanjutan, dan evaluasi dinamis untuk memastikan kelancaran acara serta pembelajaran berkelanjutan (Reed, 2008). Dengan demikian, model kolaborasi adaptif tidak hanya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan festival, tetapi juga membangun rasa memiliki di antara semua pihak yang terlibat, sekaligus menjamin keberlanjutan acara dari tahun ke tahun.

Model Collaborative Governance

Dalam Teori Governance Kolaboratif, Ansell & Gash (2007) menyatakan bahwa ada beberapa komponen penting yang memainkan peran dalam kolaborasi. Di antaranya adalah komunikasi tatap muka, yang memungkinkan kedua belah pihak berbicara satu sama lain secara langsung dan terbuka,

Pembentukan kepercayaan, yang merupakan dasar dari kerja sama yang berkelanjutan; komitmen terhadap proses, yang merupakan komitmen yang ditunjukkan oleh semua pihak untuk tetap konsisten dalam mencapai tujuan mereka; dan Komponen-komponen ini menciptakan fondasi yang kuat untuk mencapai sinergi, mengurangi kemungkinan perbedaan kepentingan yang tidak produktif, dan menjamin kolaborasi yang berkelanjutan dalam jangka panjang (Ansell & Gash, 2007).

Ansell and Gash (2008) Collaborative governance adalah pendekatan pengelolaan pemerintahan yang melibatkan pemangku kepentingan di luar pemerintahan secara langsung dan berfokus pada persetujuan dan perundingan dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat kebijakan publik.

Dalam artikel mereka yang berjudul "Governance Kolaboratif dalam Teori dan Praktik", Ansell dan Gash (2008) mengusulkan empat model pemerintahan kolaboratif:

1. Kondisi awal
2. Desain kelembagaan
3. Kepemimpinan
4. Proses Kolaborasi
5. Hasil antara dimana masing-masing variabel tersebut dapat diperkecil lagi menjadi sub-sub variabel.

Untuk variabel kondisi awal, ada tiga sub variabel, ketidak seimbangan sumber daya, insentif kerja sama, dan sejarah konflik dan kerja sama.

Dari empat model-model teori kolaboratif, penelitian ini menggunakan model teori *collaborative governance*, dalam penelitian ini, model ini dipilih karena teori ini dapat memberikan penjelasan menyeluruh tentang bagaimana kolaborasi antar stakeholder terbentuk dan berfungsi. Teori ini dapat menggambarkan secara rinci bagaimana hubungan antar pihak berjalan selama Festival Tabot dengan empat elemennya: kondisi awal (*condition of starting*), perancangan kelembagaan (*institutional design*), kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*), dan proses kolaborasi.

Pariwisata

Pariwisata adalah bidang yang mencakup perjalanan ke suatu tempat untuk tujuan yang tidak biasa, seperti rekreasi, bisnis, atau keperluan lainnya. (Putra and Sari 2021) menyatakan bahwa pariwisata mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara yang sama seperti halnya rekreasi. Industri ini terdiri dari banyak subsektor, seperti akomodasi, transportasi, kuliner, dan jasa pemandu wisata, yang saling berhubungan untuk memberikan pengalaman wisata yang optimal.

Tren pariwisata berbasis pengalaman telah meningkat pesat di Indonesia dalam lima tahun terakhir. Wisatawan saat ini lebih mencari interaksi langsung dengan destinasi melalui aktivitas budaya lokal atau ekowisata, menurut penelitian (Fadli and Ramadhan 2022). Pergeseran ini mendorong pelaku industri untuk melakukan hal-hal baru dengan menggabungkan teknologi dengan nilai lokal untuk meningkatkan daya tarik mereka.

Pengembangan pariwisata kontemporer sangat bergantung pada keberlanjutan. Wulandari and Mahendra (2022) menekankan pentingnya konsep pariwisata yang berkelanjutan yang menyeimbangkan kesejahteraan sosial masyarakat lokal, pelestarian lingkungan, dan kebutuhan finansial. Ini digunakan untuk mengurangi jejak karbon, mengelola limbah, dan mendidik pengunjung tentang perilaku bertanggung jawab.

Pariwisata telah menjadi prioritas pembangunan kebijakan nasional oleh pemerintah Indonesia. Menurut Wulandari and Mahendra (2022), salah satu inisiatif adalah program "10 Bali Baru", yang bertujuan untuk memperluas daftar destinasi unggulan dan menunjukkan keuntungan ekonomi pariwisata. Keberhasilan program bergantung pada infrastruktur, promosi digital, dan kemudahan akses.

Selain menghasilkan keuntungan finansial, pariwisata juga membantu diplomasi budaya dan meningkatkan citra negara di mata dunia. Susanto and Amelia (2020) menyatakan bahwa acara pariwisata internasional memiliki kemampuan untuk mempromosikan keunikan budaya Indonesia dan menciptakan hubungan kerja sama di seluruh dunia. Pariwisata dapat menjadi katalisator untuk pembangunan lintas sektor jika dikelola dengan cara yang inklusif dan berkelanjutan.

Festival Tabot di Provinsi Bengkulu

Festival Tabot, yang berlangsung di Kota Bengkulu dari 1 hingga 10 Muharram, adalah perayaan budaya dan religius tahunan yang mengingat kematian Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW, di Karbala. Tradisi ini berasal dari keturunan Muslim India (Khoja) yang datang pada abad ke-17, dan kemudian bergabung dengan budaya lokal Bengkulu. Menurut Aviandy and Nugraha (2025), acara ini menggabungkan upacara keagamaan, upacara adat, dan acara seni, yang menarik pengunjung dari dalam dan luar negeri.

Pada akhirnya, Festival Tabot berkembang menjadi acara keagamaan dan merupakan bagian dari identitas masyarakat Bengkulu. Ini dipandang sebagai daya tarik pariwisata budaya oleh pemerintah daerah dan Kementerian Pariwisata. Studi Aviandy and Nugraha (2025) menemukan bahwa sejak festival berskala nasional pertama kali diresmikan pada tahun 2023, telah ada peningkatan promosi dan infrastruktur untuk festival tersebut, yang telah menghasilkan peningkatan kunjungan wisata dan pendapatan ekonomi di daerah tersebut.

Mengambil Tanah, Duduk Penja, Meradai, Arak Penja, dan Tabot Tebuang adalah prosesi utama Festival Tabot. Setiap acara memiliki arti simbolik yang menunjukkan nilai sejarah, religius, dan komitmen sosial. Peneliti menemukan festival ini memiliki banyak manfaat pendidikan karena mengajarkan toleransi, menghormati sejarah Islam, dan melestarikan warisan budaya lokal.

Pameran kerajinan, kompetisi musik dol, makanan tradisional, dan penampilan tari daerah adalah beberapa kegiatan seni dan hiburan yang sekarang menjadi bagian dari Festival Tabot. Wisatawan yang menginginkan pengalaman budaya yang asli tetapi tetap menghibur akan menemukan kombinasi ini menarik. Menurut penelitian baru-baru ini, kisah festival ini "diframe" ulang untuk mendorong pariwisata (Aviandy dan Nugraha 2025).

Meskipun Festival Tabot memiliki banyak keuntungan, ada juga masalahnya. Beberapa di antaranya adalah bahwa itu terlalu dipromosikan, ada kemungkinan bahwa interpretasi sejarah yang berbeda dapat bertentangan satu sama lain, dan lebih baik untuk mengelola kerumunan. Untuk menjaga keseimbangan antara nilai religius, adat, dan ekonomi, studi Aviandy and Nugraha (2025) menyarankan kolaborasi yang lebih erat antara komunitas adat Tabot, pemerintah daerah, dan pelaku pariwisata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif** dengan metode **studi kasus**. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam, khususnya interaksi dan kolaborasi antar stakeholder dalam pelaksanaan Festival Tabot di Kota Bengkulu. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap makna, persepsi, dan proses yang terjadi di lapangan melalui keterlibatan langsung serta penggalian data dari berbagai perspektif informan (Creswell & Poth, 2018).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif dengan mengacu pada model analisis yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhana, dan pengorganisasian data mentah menjadi informasi yang terfokus dan relevan dengan tujuan penelitian. Tahapan ini bertujuan untuk menghilangkan data yang tidak relevan serta menyoroti temuan yang paling signifikan.

2. Penyajian Data (Data Display)

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, matriks, dan diagram untuk memudahkan pemahaman hubungan antar faktor. Penyajian data dilakukan sedemikian rupa sehingga pembaca dapat melihat pola interaksi antar stakeholder, faktor pendukung, hambatan, dan proses kolaborasi secara utuh.

3. Penarikan Kesimpulan dan Vertifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan sementara yang terus diverifikasi selama proses penelitian berlangsung. Verifikasi dilakukan dengan teknik triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keabsahan data. Kesimpulan akhir memuat gambaran menyeluruh mengenai bentuk kolaborasi, peran masing-masing stakeholder, serta faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan Festival Tabot.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Teori Collaborative Governance oleh Ansell dan Gash (2008) digunakan untuk menganalisis hasil penelitian. Model ini terdiri dari enam elemen utama yang sangat penting untuk memahami proses

kolaborasi: syarat awal, desain institusi, arahan yang membantu, proses kolaborasi, pembentukan kepercayaan, dan hasil akhir tengah.

Hubungan antara Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu dan Kerukunan Keluarga Tabut (KKT) masih berjalan secara tradisional dan informal sebelum adanya kolaborasi yang terstruktur. Selama bertahun-tahun, KKT menjadi pihak utama yang menyelenggarakan ritual Tabut sebagai warisan leluhur mereka. Masyarakat Tabut melakukan seluruh prosesi, mulai dari pembuatan Tabut dan arak-arakan, hingga prosesi tertinggi. Mereka melakukannya dengan kekuatan swadaya dan keinginan untuk melestarikan budaya. Pada masa itu, pelaksanaan Tabut lebih menekankan nilai agama dan adat istiadat daripada tujuan wisata.

Pada periode tersebut, tugas pemerintah, terutama Dinas Pariwisata, sangat terbatas. Mereka hanya memberikan dukungan administratif dan bantuan dana kecil. Bantuan formal untuk mendukung kegiatan budaya dilakukan setiap tahun tanpa pendampingan teknis, promosi, atau persiapan yang matang. Akibatnya, penyelenggaraan Tabut lebih dianggap sebagai kegiatan komunitas lokal daripada sebagai acara budaya daerah yang dimasukkan ke dalam jadwal pariwisata.

Namun, pemerintah mulai melihat potensi besar dari Festival Tabut saat perhatian terhadap pengembangan pariwisata daerah meningkat. Festival ini unik karena menggabungkan nilai-nilai sejarah, budaya, dan religius yang tidak ada di tempat lain di Indonesia. Melihat peluang ini, Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu berencana untuk memasukkan Festival Tabut ke dalam jadwal wisata resmi provinsi.

Hubungan antara pemerintah dan KKT berubah ketika Tabut ditetapkan sebagai acara pariwisata daerah. Dinas Pariwisata mulai terlibat secara aktif dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi kegiatan. Selain itu, pemerintah memberikan dukungan yang lebih luas, seperti pengelolaan anggaran, promosi melalui media, dan kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti sponsor dan keamanan. Festival menjadi lebih terorganisir dan lebih berkualitas berkat perubahan ini.

Di sisi lain, KKT mulai menyadari bahwa dukungan pemerintah sangat penting untuk mempertahankan tradisi Tabut saat modernisasi sedang berlangsung. Mereka melihat kerja sama dengan Dinas Pariwisata sebagai langkah strategis untuk memperluas jangkauan dan pengaruh budaya Tabut karena meningkatnya minat wisatawan dan perhatian publik. Namun, KKT menegaskan bahwa elemen budaya dan nilai sakral Tabut harus menjadi inti dari setiap aktivitas festival agar tradisi ini tidak kehilangan maknanya hanya karena hiburan.

Selama Festival Tabut, Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, KKT, dan wisatawan bekerja sama. Namun, ada banyak masalah yang menghambat kerja sama. Hambatan ini disebabkan oleh kendala sosial dan teknis, perbedaan kepentingan, dan keterbatasan sumber daya. Namun, setiap pihak berusaha untuk menyesuaikan diri dan menemukan cara untuk memastikan festival tidak terganggu.

Keterbatasan anggaran dan dukungan sumber daya

Keterbatasan anggaran merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi. Untuk Festival Tabut, dana dari APBD seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan teknis dan promosi. Akibatnya, sejumlah kegiatan, termasuk pelatihan panitia, peningkatan fasilitas pengunjung, dan promosi luar daerah, tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Dijelaskan langsung oleh Bapak M selaku ketua tim promosi Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu

Pembahasan

Pembahasan ini menganalisis hasil penelitian tentang kolaborasi antar stakeholder dalam pelaksanaan **Festival Tabut tahun 2025** dengan menggunakan **kerangka berpikir Ansell dan Gash (2007)**. Model *Collaborative Governance* menjelaskan bahwa keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh empat komponen utama, yaitu:

1. Kondisi Awal (Starting Condition)
2. Desain Kelembagaan (Institutional Design)
3. Kepemimpinan Fasilitatif (Facilitative Leadership)
4. Proses Kolaboratif (Collaborative Process)
5. Hasil Kolaboratif (Collaborative Outcome)

Berikut pembahasan berdasarkan temuan peneliti di lapangan.

Kondisi Awal (*Starting Condition*)

Kondisi awal kolaborasi menunjukan Pemerintah Daerah Bengkulu menjadi pihak dengan sumber daya dan dukungan keuangan paling besar, tetapi kondisi awal kolaborasi dalam pelaksanaan Festival

Tabut 2025 menunjukkan adanya ketimpangan sumber daya antar pihak yang berpartisipasi. Data menunjukkan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,3 miliar untuk mendukung penyelenggaraan festival, yang akan melibatkan kegiatan budaya, promosi, dan penguatan usaha kecil dan menengah (UMKM).

Kolaborasi dapat dilakukan dengan anggaran ini sebagai sumber daya utama. Ini juga mendorong pihak-pihak lain seperti Komite Tabut, pelaku UMKM, dan komunitas budaya untuk berpartisipasi. Komitmen untuk melestarikan budaya lokal dan mengembangkan industri pariwisata ditunjukkan dengan dukungan dana pemerintah. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki peran yang lebih besar dalam hal ritual dan tradisi daripada membuat keputusan strategis. Ini menunjukkan bahwa untuk membuat kolaborasi lebih inklusif dan setara, keseimbangan kekuasaan dan sumber daya antar pihak harus diperkuat.

Desain Kelembagaan (*Institutional Design*)

Meskipun Festival Tabut belum sepenuhnya terorganisir secara formal, desain kelembagaan menunjukkan kemajuan ke arah kerja sama yang lebih terbuka. Komite Tabut dan organisasi budaya melaksanakan kegiatan di lapangan, sedangkan Dinas Pariwisata bertindak sebagai koordinator utama. Terbentuknya forum komunikasi, yang memperkuat koordinasi lintas sektor, telah mendorong keterlibatan stakeholder lain, seperti media, pelaku UMKM, dan komunitas kreatif.

Namun, kebijakan daerah atau payung hukum yang permanen belum mengatur mekanisme kerja sama ini, yang hanya bersifat spontan. Karena sistem kelembagaan formal tidak ada, kolaborasi tahunan sangat bergantung pada inisiatif tahunan pemerintah dan tokoh adat. Akibatnya, perancangan kelembagaan yang lebih sistematis diperlukan agar kolaborasi ini dapat berlangsung secara konsisten setiap tahunnya.

Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*)

Untuk menjaga semua pihak berkolaborasi, peran kepemimpinan sangat penting. Dinas Pariwisata berfungsi sebagai pemimpin fasilitatif yang membantu orang berkomunikasi, menyelesaikan perbedaan kepentingan, dan memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai jadwal. Tokoh adat dalam Komite Tabut juga berperan penting dalam menjaga nilai budaya asli dan membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Terbukti bahwa kepemimpinan partisipatif mengurangi kemungkinan konflik dan meningkatkan rasa memiliki festival. Walau bagaimanapun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan ini masih sangat bergantung pada figur tertentu daripada sistem kepemimpinan kelembagaan yang stabil. Oleh karena itu, hal yang perlu dilakukan ke depan adalah meningkatkan kemampuan kepemimpinan kolaboratif lintas sektor.

Proses Kolaborasi

Dalam Festival Tabut, proses kolaborasi antar stakeholder menunjukkan kemajuan. Ini terlihat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan; peningkatan koordinasi dan komunikasi antarpihak berdampak langsung pada keberhasilan festival.

Bukti empiris menunjukkan bahwa kerja sama efektif menghasilkan capaian yang signifikan; jumlah pengunjung meningkat dari target 150.000 menjadi 244.881 orang. Lonjakan ini menunjukkan bahwa strategi promosi yang berhasil, pengelolaan anggaran yang efektif, dan kerja sama yang efektif antara berbagai pihak dalam menyelenggarakan acara budaya nasional berhasil. Hasil ini juga menunjukkan bahwa proses kerja sama yang efektif dapat membantu melestarikan budaya dan meningkatkan ekonomi lokal serta citra pariwisata daerah.

Namun demikian, tahap evaluasi pasca-acara perlu diperkuat untuk memastikan bahwa kedua belah pihak dapat saling belajar (*mutual learning*) dan memperbaiki kesalahan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Tantangan dan Hambatan

Hasil penelitian menunjukkan beberapa tantangan dan hambatan utama yang perlu dipertimbangkan, meskipun kerja sama di Festival Tabut berjalan cukup baik:

1. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Meskipun pemerintah telah memberikan dana sebesar 1,3 miliar rupiah, jumlah dana tersebut masih sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan yang sebenarnya di lapangan. Pelatihan SDM, infrastruktur pendukung, dan kegiatan promosi tidak sepenuhnya terdani. Akibatnya, beberapa pihak yang terlibat, terutama UMKM dan komunitas budaya, masih bergantung pada dana mandiri.

Dalam hal manajemen acara dan promosi digital, jumlah dan kapasitas karyawan pelaksana masih terbatas, terutama di tingkat komunitas lokal. Pendampingan pemerintah dan pelatihan teknis belum optimal, sehingga kerja sama belum sepenuhnya produktif.

2. Keterbatasan Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung

Dengan 244.881 pengunjung, fasilitas seperti parkir, kebersihan, dan penginapan masih kurang untuk memenuhi kebutuhan pengunjung. Ini menyebabkan masalah teknis dan ketidaknyamanan bagi pengunjung selama acara.

Secara keseluruhan, berdasarkan model Ansell & Gash (2007), kerja sama antara berbagai pihak telah menunjukkan hasil yang positif dalam melaksanakan Festival Tabut tahun 2025. Peningkatan jumlah pengunjung sebagai hasil dari proses kerja sama lintas sektor dan dukungan anggaran pemerintah sebagai syarat awal menunjukkan keberhasilan kerja sama lintas sektor.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab IV, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan Festival Tabut di Provinsi Bengkulu, semua pihak berkolaborasi secara berjalan dengan baik dan sinergis. Peningkatan jumlah pengunjung yang signifikan dari target awal 150.000 orang menjadi 244.881 orang menunjukkan keberhasilan kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah, Komite Tabut, masyarakat adat, pelaku UMKM, dan sektor swasta dalam menciptakan festival yang lebih inklusif, partisipatif, dan ramah lingkungan.
 1. Kondisi Awal (*Starting Condition*). Pemerintah Bengkulu menjadi aktor utama dalam penyediaan sumber daya, terutama melalui alokasi anggaran sebesar Rp. 1,3M untuk mendukung kegiatan Festival. Kondisi awal ini menunjukkan adanya ketimpangan sumber daya antara pemerintah dan masyarakat adat, namun kolaborasi tetap dapat terbangun melalui kepercayaan dan komitmen bersama.
 2. Desain Kelembagaan (*Institutional Design*). Meskipun struktur kelembagaan kolaborasi telah terbentuk melalui koordinasi lintas instansi dan pelibatan berbagai pihak, masih bersifat informal dan bergantung pada kebijakan tahunan dan kepemimpinan individual.
 3. Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*). Kepemimpinan Dinas Pariwisata sebagai kordinator dan peran tokoh adat dalam menjaga nilai-nilai budaya menjadi faktor kunci keberhasilan kolaborasi. Kepemimpinan yang bersifat terbuka, komunikatif, dan adaptif telah mendorong terbuka kepercayaan (*trust building*) serta rasa tanggung jawab kolektif diantara seluruh pihak yang terlibat.
 4. Proses Kolaborasi (*Collaborative Proses*). Kolaborasi berjalan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Setiap pihak berkontribusi sesuai kapasitasnya, seperti pemerintah dalam penyediaan fasilitas dan promosi, masyarakat adat dalam menjaga keaslian tradisi, dan pelaku usaha dalam memperkuat aspek ekonomi kreatif. Keberhasilan pelaksanaan festival tidak hanya terlihat dari jumlah pengunjung yang melampaui target, tetapi juga meningkatnya keterlibatan masyarakat lokal dan kesadaran akan nilai budaya daerah.
2. **Tantangan dan hambatan dalam kolaborasi** masih ditemukan pada beberapa aspek penting, yaitu keterbatasan anggaran tambahan, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, perbedaan orientasi antara pelestarian budaya dan pariwisata, serta keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pendukung kegiatan. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa meskipun kolaborasi telah terbentuk, keberlanjutannya masih membutuhkan penguatan kelembagaan, koordinasi strategis yang lebih sistematis, dan optimalisasi sumber daya lintas sektor.

Saran

1. **Bagi Pemerintah Daerah** Pemerintah perlu memperkuat landasan hukum dan kebijakan mengenai mekanisme kolaborasi antar stakeholder melalui **Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur**. Selain itu, peningkatan **alokasi anggaran dan diversifikasi sumber pendanaan** dari sektor swasta harus dilakukan untuk menjamin keberlanjutan festival di masa depan.
2. **Bagi Pemerintah Daerah** Pemerintah perlu memperkuat landasan hukum dan kebijakan mengenai mekanisme kolaborasi antar stakeholder melalui **Peraturan Daerah atau Peraturan**

- Gubernur.** Selain itu, peningkatan **alokasi anggaran dan diversifikasi sumber pendanaan** dari sektor swasta harus dilakukan untuk menjamin keberlanjutan festival di masa depan.
3. **Bagi Pelaku Usaha, UMKM, dan Komunitas Kreatif** Diharapkan mampu mengambil peran lebih aktif dalam pengembangan ekonomi kreatif lokal melalui partisipasi dalam penyediaan produk, jasa, serta promosi digital. Dukungan pelatihan manajemen dan pemasaran dari pemerintah sangat penting untuk memperkuat kapasitas mereka.
 4. **Bagi Akademisi dan Peneliti** Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai **model evaluasi kolaborasi multistakeholder** yang berfokus pada pengukuran kinerja kolaboratif dan dampak sosial-ekonomi dari pelaksanaan festival budaya.
 5. Bagi semua stakeholder disarankan untuk membentuk forum kolaborasi festival tabut bengkulu sebagai wadah komunikasi tetap antar pihak yang berfungsi untuk kordinasi, evaluasi, serta inovasi bersama dalam pengelolaan kegiatan dimasa depan

DAFTAR PUSTAKA

- Andari, R, D Saputra, and A Fauzi. 2020. "Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan Di Indonesia." *Jurnal Pariwisata Dan Budaya* 5 (1): 45–58. <https://doi.org/10.1jpb.2020>.
- Andrades, Lucia, and Frederic Dimanche. n.d. "Destination Competitiveness in Collaborative Contexts: Conceptual Model and Empirical Evidence." *Journal of Destination Marketing & .*
- Ansell, Chris, and Alison Gash. 2008. "Collaborative Governance in Theory and Practice." *Journal of Public Administration Research and Theory* 18 (4): 543–71. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.
- Aref, Fariborz, and Ma'rof Redzuan. 2022. "Social Capital and Collaborative Tourism Development." *Sustainability* 14 (7): 4229. <https://doi.org/10.3390/su14074229>.
- Aviandy, M, and F M Nugraha. 2025. "Bengkulu's Tabot Tradition: The Hidden Framing of Contesting Celebration Narratives." *Cogent Arts & Humanities* 12 (1): 2474879. <https://doi.org/10.1080/23311983.2025.2474879>.
- Bengkulu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi. 2023. "Laporan Strategi Pelibatan Masyarakat Pada Festival Tabot." Disbudpar Provinsi Bengkulu.
- Bramwell, B, and B Lane. 2011. "Critical Research on the Governance of Tourism and Sustainability." *Journal of Sustainable Tourism* 19 (4–5): 411–21. <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.580586>.